



ANTISIPASI BENCANA HIDROMETEOROLOGI JELANG MUSIM PENGHUJAN

Kendati musim kemarau masih melanda sebagian besar wilayah Indonesia, tetapi terdapat daerah yang mengalami curah hujan tinggi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau sejumlah daerah untuk bersiap atas potensi bencana hidrometeorologi.

POTENSI DAMPAK KEKERINGAN

- Persebaran air berkurang
- Risiko kebakaran semak, hutan, lahan, dan pemukiman meningkat.

IMBAUAN KESIAPAN BENCANA METEOROLOGI

Daerah kekeringan

- Waspada kobakan hutan dan semak.
- Bersiap menanggapi dampak kekeringan.

Daerah curah hujan tinggi

- Waspadakan hujan es, hujan lebat, berperiode singkat, dan angin putting beling.
- Manfaatkan curah hujan untuk menambah luas tanam.
- Panen air hujan dan isi waduk/danau untuk periode musim kemarau mendatang.

Sultan Minta Pembangunan Berorientasi Vertikal

JOGJA-Gubernur DIY Sri Sultan HB X meminta pemerintah kabupaten dan kota khususnya Sleman agar pembangunan perumahan berorientasi vertikal untuk menghemat lahan terbuka hijau. Permintaan tersebut menanggapi alih fungsi lahan yang masif sehingga berimbas pada perubahan cuaca di DIY yang semakin panas.

Ujung Hasamudin, Abdi Hamid Razak, E. Singur Kustel redaksi@harianjogja.com

Jika semua pemangku kepentingan mematuhi regulasi, tidak akan terjadi alih fungsi lahan yang sembarangan.

BPBD di sejumlah daerah di DIY mulai mengantisipasi potensi bencana akibat cuaca ekstrem.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, mengungkapkan suhu udara di DIY dan Jawa Tengah kian panas, lantaran tingginya laju alih fungsi lahan. Selain itu, emisi gas rumah kaca juga turut berpengaruh terhadap meningkatnya suhu di Bumi Mataram.

Temperatur rata-rata di Jateng dan DIY mengalami tren kenaikan selama 30 tahun terakhir. Kenaikan itu, kata mantan Rektor UGM tersebut, tidak terjadi secara merata, tetapi di wilayah dataran tengah mengalami kenaikan lebih tinggi daripada pesisir.

Sultan mengaku tidak bisa melarang orang luar untuk tinggal di DIY dan membangun rumah. Yang bisa dilakukan adalah membatasi pembangunan rumah lebih ke arah vertikal ketimbang horizontal yang bisa memakan banyak lahan.

"Kalau saya lebih cenderung bagaimana Sleman itu membatasi, dalam arti membatasi bukan orang tidak boleh tinggal di Sleman tapi sudah harus membangun tidak boleh melebar dalam arti tanah yang luas tapi naik. Sehingga tanah itu enggak perlu luas tapi naik," kata Sultan di Kompleks Kepatihan, Jogja, Selasa (12/10).

► Halaman 10

Sultan Minta...

Pembangunan rumah juga diatur berapa persen untuk bangunan dan berapa persen untuk halaman terbuka.

Dengan demikian akan banyak ruang terbuka hijau privat maupun publik. "Larinya ke situ, jadi sudah waktunya kalau enggak nanti pengertian rumah perlu tanah yang luas kan berbeda dengan tanah izin bertingkat sehingga enggak perlu tanah itu luas," ucap Sultan.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji, menambahkan sebenarnya sudah ada regulasinya dalam Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang daerah mana saja yang boleh dialihfungsikan.

Selain itu, juga ada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur daerah mana saja yang difungsikan untuk pertanian, lahan terbuka hijau, maupun untuk permukiman.

"Nah sepanjang para pemangku kepentingan mengikuti regulasi yang sudah ada saya kira perubahan atau peralihan lahan akan sesuai dengan ketentuan. Dan pada saat kita membuat regulasi itu sudah kita pikirkan supaya tidak ada kerusakan lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem, ketersediaan air dan juga pada umumnya perubahan iklim. Jadi pada prinsipnya itu," kata Baskara Aji.

Jika semua pemangku kepentingan mematuhi regulasi, kata dia, tidak akan terjadi alih fungsi lahan yang sembarangan. Pemda DIY juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait baik di Pemda DIY maupun pemerintah kabupaten dan kota bisa mengawasi peralihan lahan tersebut agar sesuai regulasi.

Sama halnya juga dengan

pemanfaatan tanah kas desa sudah diatur sedemikian rupa untuk menjaga keberlangsungan lingkungan. "Misalnya oh ini mau dipakai untuk tempat wisata, ya harus tempat wisata enggak boleh permukiman. Kalau ini izin dipergunakan untuk ekowisata atau pertanian ya harus seperti itu karena pada saat memberikan izin, Gubernur sudah mempertimbangkan RTRW dan peraturan Gubernur tentang alih status tanah," kata Baskara Aji.

Antisipasi Bencana

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di sejumlah daerah di DIY mulai mengantisipasi potensi bencana akibat cuaca ekstrem. BPBD Sleman menyiagakan *Early Warning System* (EWS) di lereng Merapi dan Prambanan. Kepala Seksi Mitigasi Bencana BPBD Sleman Joko Lelono mengatakan potensi bencana akibat cuaca ekstrem pada musim hujan ini merujuk pada peringatan dini yang selalu di-update oleh BMKG. Dari sejumlah sungai yang berhulu Merapi diperkirakan Kali Gendol dan Kali Boyong berpotensi mengalami banjir lahar hujan.

"Itu terjadi jika intensitas hujan di atas Merapi terjadi tinggi dengan durasi lama. Kami siapkan 20 EWS untuk memantau potensi bencana banjir lahar di sungai-sungai yang berhulu Merapi," kata Joko, Selasa.

Adapun di perbukitan Prambanan yang memiliki potensi bencana longsor, lanjut Joko, BPBD sudah memasang tiga EWS. Masyarakat diminta mewaspadaai potensi bencana menghadapi potensi cuaca ekstrem ini. "Kalau ada potensi bencana atau peringatan dini dari BMKG, kami langsung sampaikan ke masing-masing

kapanewon," katanya.

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Jogja, Bayu Wijayanto, menjelaskan langkah antisipasi yang dilakukan dengan mengirim surat imbauan peringatan kepada masyarakat, meng-update perkembangan cuaca, menyiapkan pasukan dan peralatan apabila terjadi kebencanaan, serta menguji coba sistem peringatan dini.

Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim penghujan akan berlangsung pada akhir Oktober mendatang. "Semua pinggir sungai kami anggap rawan," kata Bayu.

Selain BPBD Kota Jogja, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja juga mengintensifkan pemangkasan pohon-pohon perindang yang rimbun. Pemangkasan terbatas dengan mengurangi dahan dan daun menjelang musim penghujan ini. Selain untuk faktor keindahan, pemangkasan ini untuk mengantisipasi potensi pohon tumbang saat hujan deras.

Mengantisipasi segala potensi risiko bencana jelang musim penghujan, BPBD Bantul intensifkan komunikasi dengan sejumlah sukarelawan di daerah rawan. Pos-pos siaga bencana pun siap diaktifkan kembali jelang musim hujan.

Kepala Pelaksana BPBD Bantul, Dwi Daryanto menyampaikan pemantauan di pos-pos siaga bakal diaktifkan kembali memasuki musim penghujan. Sejumlah titik rawan banjir dan longsor akan dibentuk pos-pos yang memantau situasi terkini di lokasi rawan. "Nanti kita buat pos. Kurang lebih 20 pos ada di beberapa kalurahan untuk antisipasi, mana kala nanti sudah betul-betul memasuki musim penghujan secara intens," katanya. (Catut Dwi Janati)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPBD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 24 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005